

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BANTUAN SOSIAL DENGAN PENDEKATAN LOGIC MODEL ANALYSIS

IDG Anom Jambe Adnyana<sup>1\*</sup>, Nyoman Suadnyana Pasek<sup>2</sup>, Gusti Ngurah Agung Dananjaya<sup>3</sup>, Made Aristia Prayudi<sup>4</sup>



<sup>123</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, Indonesia

\*Corresponding author: [idg.anom.jambe@undiksha.ac.id](mailto:idg.anom.jambe@undiksha.ac.id)<sup>1\*</sup>

### Abstract

Mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program kerja merupakan upaya terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kinerja pemerintah selaku pelaksana program adalah isu yang sangat penting di tengah maraknya kasus penyalahgunaan keuangan sektor publik saat menangani Pandemi COVID-19 demi menciptakan good governance. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai instansi pemerintah telah berupaya mengurangi dampak dari COVID-19 melalui optimalisasi akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan bantuan sosial.

Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi aspek logis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial semasa pandemi COVID-19. Keterkaitan teori akuntabilitas dan NPM theory dalam upaya penanganan COVID-19 dapat dipahami melalui pendekatan Logic Model (LM) kuadran Friedman sehingga mampu memberikan performa terbaik dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020. Data dikumpulkan dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah proses penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah memenuhi skema logika yang relevan. Berdasarkan pendekatan LM khususnya pada kuadran satu sebagai kuadran prioritas telah menunjukkan hasil kualitas dampak meningkat sebesar 0,27% jika dibandingkan dengan data KPM yang dinyatakan graduasi mandiri tahun 2019. Selain itu pada kuadran dua terlihat hasil positif kualitas upaya Dinas Sosial yang mencapai 84%.

**Keywords:** COVID-19; Bantuan sosial; Akuntabilitas; Logis.

### Abstract

Realizing accountability in every work program implementation is the best effort to foster public trust. The government's performance is a very important issue of public sector finances when dealing with the Pandemic COVID-19 in order to create good governance. However, the office of Social Service as a government agency has tried to reduce the impact of COVID-19 through optimizing performance accountability related to social assistance.

The purpose is to evaluate the logical aspects of social assistance during the COVID-19 pandemic. The relationship between accountability theory and NPM theory in efforts to deal with COVID-19 can be understood through the Friedman quadrant Logic Model (LM) approach. So it is able to provide the best performance in implementing Inpres No. 4 of 2020. Data was collected by depth interviews, field observations and document studies. The data collected was analyzed using triangulation techniques.

The result of this research is social service in Buleleng Regency has fulfilled the relevant logic scheme. Quadrant one has increase in the quality of impact by 0.27% when compared to KPM data which was declared independent graduation in 2019. Quadrant two has positive results were seen in the quality of the efforts of the Social Service which reached 84%.

**Keywords:** COVID-19; Social assistance; Accountability; Logic.

### Pendahuluan

Mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program kerja instansi sektor publik merupakan upaya terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Inastri, M. A., & Mimba, N. P. S. H., 2017). Selaku pelaksana program isu tersebut adalah isu yang sangat penting di tengah maraknya kasus penyalahgunaan keuangan sektor

publik (Stanley *et al.*, 2008). Namun, organisasi pemerintahan sering diidentikkan dengan citra yang buruk (Halim, 2012). Tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2015, terungkap bahwa ada kerugian negara senilai Rp 33,46 triliun. Dilain sisi, tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia saat Pandemi *COVID-19* justru meningkat setelah pemerintah mengupayakan penyaluran bantuan sosial *COVID-19*. BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Bulan September 2020 sebanyak 27,55 juta orang, bertambah menjadi 1,13 juta orang dari Bulan Maret 2020 dan bertambah menjadi 2,76 juta orang dibandingkan Bulan September 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Beberapa kebijakan bantuan sosial dalam penanganan pandemi *COVID-19* di Indonesia telah disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, seiring pelaksanaan program masih saja ditemukan bentuk penyelewengan bantuan kepada masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Proses pengawasan dari program ini sangat perlu diperhatikan demi kelancaran program. Pelaksanaan *monitoring* dan pengendalian kemajuan kinerja bawahan dan unit kinerja dalam mencapai tujuan, manajer akan terbantu oleh pengukuran kinerja yang terstruktur dengan baik (Mahmudi, 2015).

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali memiliki peran tinggi dalam mendukung kinerja pengelolaan keuangan dan sekaligus melaporkan kinerja berbasis kemasyarakatan pada masa pandemi. Proses pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menjadi sangat kompleks. Disebabkan oleh adanya tujuan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Berdasarkan data BPS tahun 2020 tentang luas wilayah Pulau Bali bahwa Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas sebesar sebesar 1.364,73 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 791.813 jiwa (BPS Provinsi Bali, 2016). Jika data jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2020 dibandingkan dengan data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020 sebanyak 27.655 KPM, maka persentase perbandingannya yakni 3,49%.

**Tabel 1.** Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng, 2012-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	350.902	37,55	5,79
2017	372.399	37,48	5,74
2018	395.678	35,20	5,36
2019	401.377	34,26	5,19
2020	424.602	35,25	5,32

Sumber : Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2021)

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa pada tahun 2020 proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Buleleng belum menyentuh seluruh penduduk miskin. Oleh sebab itu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memerlukan proses pengawasan program berbasis kinerja.

Pelaporan kinerja menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melayani masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kinerja sesungguhnya organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi publik (Baskoro & Akbar, 2018). Keterkaitan antara

indikator kinerja pelaksanaan bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan *stewardship theory* sebagai dasar motivasi disatukan menggunakan *New Public Management (NPM) Theory*. Teori NPM menjadi sebuah pola pikir baru bagi instansi publik memproses pengelolaan yang bertanggungjawab dengan mengedepankan pendekatan manajerial dalam kinerja birokrasi sebagai upaya memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang diinginkan dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*), bukan berorientasi pada input atau masukan (Pilcher, 2011).

Pendekatan yang dipandang mampu mendukung teori NPM dan penyajian laporan kinerja dalam bentuk visual yaitu pendekatan *Logic Model (LM)*. LM menawarkan cara untuk mendeskripsikan dan berbagi pemahaman melalui rantai hasil, bagan urutan hasil, dan peta strategi tentang hubungan di antara elemen yang diperlukan untuk menjalankan program atau upaya perubahan (Julian, 1997; Julian et al., 1995; Knowlton, L.W. & Phillips, 2013; Wholey, 1979). Hasil penelitian Tri Astanto (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan penyusunan informasi kinerja telah sesuai dengan tahapan dalam membangun *logic model*, namun terdapat hal krusial yang tidak terpenuhi yaitu tidak dilakukannya tahap menggambarkan model serta penyusunan tidak sepenuhnya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan stakeholders utama. Secara tradisional pelayanan publik telah dikelola dibawah logika birokrasi, tetapi bila disandingkan dengan logika mengelola layanan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelanggan maka akan terjadi ketimpangan (Aalto & Kallio, 2019). Sehingga dalam penyesuaian penyelenggaraan laporan kinerja yang sulit, pendekatan LM dikembangkan menggunakan model *On-going Performance Management & Measurement (OPM&M)* atau *Performance Blueprint (BP)*. Model pengembangan tersebut menggambarkan alur LM secara komprehensif dengan dukungan Empat Kuadran Friedman pada tahap *output* (Longo, 2002).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik akuntabilitas penerapan indikator kinerja bantuan sosial selama masa pandemi *COVID-19* berdasarkan pendekatan *Blueprint Logic Model Analysis*. Proses penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui implikasi atas bantuan sosial terhadap target penanganan *COVID-19* yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Penelitian tentang kinerja pelayanan kemasyarakatan berupa bantuan sosial dalam kondisi pandemi belum banyak ditemukan. Sebenarnya riset-riset seperti kinerja pengelolaan dalam suatu organisasi sudah banyak diteliti. Namun, mengenai kinerja pelayanan kemasyarakatan berupa bantuan sosial yang diselenggarakan akuntansi sektor publik saat menghadapi pandemi *COVID-19* belum banyak ditemukan karena merupakan hal baru dalam pelayanan kemasyarakatan. Fokus penelitian ini mencakup praktik kinerja pengelolaan bantuan sosial yang diproses secara berkesinambungan dan diharapkan sesuai dengan target. Praktik kinerja yang dimaksud meliputi kinerja tahap perencanaan (meliputi rencana strategis hingga target sasaran bantuan sosial), kinerja tahap pelaksanaan (meliputi penilaian penerima bantuan yang layak dan memadai sesuai kriteria), dan kinerja tahap pertanggungjawaban yang sudah berlangsung.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi Kasus digunakan untuk dapat menjelaskan secara komprehensif sumber data yang tidak tampak dengan tegas sehingga dapat digunakan dalam pembahasan (Yin, 2009). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2013).

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sub Bagian Perencanaan di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan

Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu memberikan kajian dan analisa terkait sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan administrasi termasuk bantuan sosial, dan bertanggungjawab atas penyusunan laporan perencanaan periodik dalam mendukung SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Tugas Pendamping Sosial PKH adalah memberikan layanan fasilitator dan verifikator terhadap calon penerima manfaat PKH dari awal pendataan hingga menerima bantuan sosial, memberikan laporan berkala yang diunggah melalui aplikasi *e-PKH* yang telah terkoneksi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Kementerian Sosial, bertanggungjawab atas pemberian rekomendasi kepada masyarakat yang layak dinyatakan graduasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Pertama data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan tenaga pendamping sosial dari PKH. Klasifikasi tenaga pendamping sosial tersebut yaitu memiliki pengalaman lebih dari lima tahun sehingga data yang terkumpul tidak hanya banyak tetapi juga akurat dan mampu mengungkapkan keunikan yang ada. Selanjutnya peneliti melakukan teknik observasi pada berlangsungnya proses perencanaan pengelolaan bantuan sosial oleh bagian perencanaan dan proses pelaksanaan pemberian bantuan ke masyarakat di lapangan maupun rapat pertanggungjawaban. Terakhir peneliti melakukan studi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dan LKPJ Dinas Sosial tahun 2020.

Teknik analisis studi kasus atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang peneliti gunakan mengikuti desain penelitian studi kasus yang dikemukakan oleh Yin (2013) yang mana membagi proses studi kasus menjadi tiga langkah yaitu 1) *define and design*, 2) *prepare, collage and analyze*, dan 3) *analyze and conclude*. Selanjutnya yaitu mereduksi data menggunakan triangulasi untuk menambah validitas data lebih terjamin keabsahannya. Proses reduksi penting dilakukan dalam konteks pemfokusan penggalian data yang nantinya akan mengarah pada pengujian proposisi penelitian atau menambah variasi penjelasan maupun pemaknaan yang sudah ada. Terakhir adalah Hasil penelitian disajikan dalam bentuk produk tertulis dari versi multikasus dari kasus tunggal klasik berdasarkan analisis kualitatif yang valid dan handal.

## Hasil dan Pembahasan

Ketepatan sasaran pengelolaan bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tidak lepas dari peran pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pendamping sosial, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi dan antusias. Keterkaitan teori akuntabilitas dengan penelitian ini yaitu Dinas Sosial merupakan organisasi sektor publik yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam memimpin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Implementasi teori akuntabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yang dimaksud adalah pengelolaan bantuan sosial yang berasal dari APBN dan APBD dengan melaporkan setiap tiga bulan sekali melalui LKPJ kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti Bupati Kabupaten Buleleng dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal yaitu kepada masyarakat luas, implementasinya adalah melibatkan unsur atau komponen masyarakat yang berada di Kabupaten Buleleng, seperti Kepala/Perbekel Desa, Kepala Lurah, LSM, dan unsur masyarakat atau organisasi yang berada di Kabupaten Buleleng melalui Musrenbang.

Demi menjaga kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tetap baik dan sesuai target, maka diperlukan penerapan teori NPM. Jika dengan konsep instansi publik lama yakni

mengikuti prosedur, aturan, dan perintah, maka dengan teori NPM instansi publik mampu memberikan pandangan yang jelas terkait pencapaian hasil atau tujuan kepada masyarakat. Peran dari indikator kinerja sangat penting sebab tidak selamanya asumsi pencapaian tujuan itu mudah dan cenderung kompleks. Oleh sebab itu, LM dalam teori NPM menurut Wholey (1979) mampu mendeskripsikan dan berbagi pemahaman melalui rantai hasil. Indikator kinerja tersebut kemudian dianalisis melalui pemikiran kelompok kuantitas dan kualitas, serta dari upaya (*effort*) dan hasil/dampak (*effect*) yang disebut sebagai pendekatan OPM&M atau BP. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan telah mampu melihat hubungan logika dari sebuah program dan mengevaluasinya karena metode pendekatan OPM&M sudah sesuai dan komprehensif untuk organisasi sektor publik.

Hubungan antara penerapan teori NPM dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 sangat relevan karena Dinas Sosial Kabupaten Buleleng lebih fokus pada asumsi pencapaian tujuan organisasi melalui percepatan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tanpa mengurangi aspek kompleksitasnya. Sehingga dalam penelitian ini, teori akuntabilitas, teori NPM dan dibantu pendekatan OPM&M atau BP akan mampu mengungkap evaluasi pengelolaan bantuan sosial yang disalurkan dari Dinas Sosial baik itu dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban yang dimana ketiga tahapan ini mengandung aspek keuangan, ketepatan sasaran dan prosedural.

**Tabel 2.** Rangkuman Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

RENSTRA		LKPJ			
URAIAN PROGRAM UTAMA	USULAN ANGGARAN	TARGET		REALISASI	
		ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 645.950.000,00	Rp 382.252.200,00	14,5%	Rp 381.422.110,00	99,78%
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 819.170.000,00	Rp 190.329.700,00	15,4%	Rp 189.507.050,00	99,56%
Program pembinaan anak terlantar	Rp 369.600.000,00	Rp 96.064.900,00	35,2%	Rp 95.678.650,00	99,59%
3. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Rp 336.760.000,00	Rp 61.348.100,00	24,3%	Rp 61.249.050,00	99,83%
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp 286.160.000,00	Rp 114.728.200,00	19,5%	Rp 114.041.150,00	99,40%
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 302.500.000,00	Rp 96.271.000,00	5,3%	Rp 96.200.100,00	99,92%
6. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Rp 1.832.000.000,00	Rp 932.310.950,00	18%	Rp 929.454.248,00	99,69%
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.079.500.000,00	Rp 645.904.000,00	84%	Rp 641.221.070,00	99,27%
8. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp 818.500.000,00	Rp 222.526.000,00	9,6%	Rp 221.488.500,00	99,53%
<b>JUMLAH</b>	Rp 6.490.140.000,00	Rp 2.741.735.050,00		Rp 2.730.261.928,00	

Sumber: Data diolah (2021)

Jika dilihat dari Tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahwa uraian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki target realisasi paling tinggi yakni 84%. Penyebabnya adalah indikator pendukung uraian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu “Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Masalah-Masalah Strategis dan Tertanganinya Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa”, kinerjanya meningkat drastis yaitu 257,5%. Peningkatan itu disebabkan oleh banyaknya usulan dari desa untuk permohonan bantuan sembako akibat dari dampak bencana non alam (Pandemi COVID-19). Dari seluruh anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, indikator “Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Masalah-Masalah Strategis dan Tertanganinya Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa” merupakan muara dari anggaran yang dialihkan dari indikator lainnya. Sehingga target indikator sampai dengan akhir RPJMD (tahun 2022) yaitu 2.750 KK sudah tercapai dan bahkan melebihi target tersebut pada tahun 2020 yaitu 500 KK yang pada kenyataannya sudah mencapai angka 3.900 KK.

Tahap awal implementasi BP yakni *inputs* berupa Musrenbang untuk menentukan anggaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng baik yang berasal dari APBN dan APBD. Tahap kedua implementasi BP yakni *activities* berupa penyaluran bantuan sosial dimana akan terjadi jalinan kerjasama antara penerima bantuan dan penyedia layanan.

	<i>Quantity</i>	<i>Quality</i>
<i>Effort</i>	<p><i>What did we do (#)?</i></p> <p>4</p>	<p><i>How well did we do it (%)?</i></p> <p>2</p>
<i>Effect</i>	<p><i>Is anyone better off (#)?</i></p> <p>3</p>	<p><i>How are they better off (%)?</i></p> <p>1</p>

**Gambar 1.** Empat Kuadran Friedman.

Sumber: Friedman et al. (2001)

Tahap ketiga implementasi BP yaitu *outputs* sesuai Gambar 1 yang terbagi menjadi empat kuadran yaitu diantaranya. 1) Kuadran keempat terdapat kuantitas upaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan sosial berupa Renstra sebanyak lima SPM yaitu pemberdayaan fakir miskin, pembinaan panti asuhan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pelayanan penyandang cacat dan lansia. Penjabaran SPM sesuai dengan Tabel 2 yakni sebanyak sembilan program utama. 2) Kuadran kedua terdapat kualitas upaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan sosial berupa target capaian Renstra. Target capaian terbesar yang muncul pada Renstra yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 84% sesuai dengan Tabel 2. 3) Kuadran ketiga terdapat kuantitas dampak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan sosial berupa realisasi kinerja LKPJ. Khusus pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menargetkan indikator sampai dengan akhir RPJMD (tahun 2022) yaitu 2.750 KK. Sedangkan sudah tercapai dan bahkan melebihi target tersebut pada tahun 2020 yaitu 500 KK yang pada kenyataannya mencapai angka 3900 KK atau meningkat sebesar 257,5%. 4) Kuadran pertama terdapat kualitas dampak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan sosial berupa data graduasi sejahtera mandiri masyarakat penerima manfaat. Jumlah KPM yang telah dinyatakan graduasi sejahtera mandiri pada bulan November 2020 yaitu 79 KPM dari total 27.655 KPM. KPM yang termasuk sebagai graduasi sejahtera mandiri adalah KPM yang sukarela mengundurkan diri sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Angka tersebut dapat disebut signifikan karena berdasarkan data graduasi sejahtera mandiri

sebelumnya pada tahun 2019 bulan Juni hanya sebanyak 4 KPM dengan total KPM sebanyak 26.635 KPM. Tahap keempat implementasi BP yaitu *outcome* yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat pelayanan dan manfaat komunitas. Manfaat pelayanan mampu dicapai oleh dinas sosial karena telah memberikan kuantitas upaya dan kualitas upaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam menyalurkan bantuan sosial. Sedangkan manfaat komunitas mampu dicapai oleh dinas sosial karena memberikan kuantitas dampak dan kualitas dampak yang nyata dalam menyalurkan bantuan sosial.

### Simpulan

Proses penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah memenuhi skema logika yang relevan. Berdasarkan pendekatan LM kuadran Friedman khususnya pada kuadran pertama sebagai kuadran prioritas telah menunjukkan hasil kualitas dampak meningkat sebesar 0,27% jika dibandingkan dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan graduasi mandiri tahun 2019. Selain itu pada kuadran kedua turut memberikan hasil positif atas kualitas upaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang mencapai 84%. Hasil yang dicapai dalam pengelolaan bantuan sosial tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta seluruh masyarakat yang mampu bersinergi dengan optimal. Dukungan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dipantau melalui kuadran keempat yang menjabarkan tentang kuantitas upaya dalam menangani pandemi *COVID-19*. Diketahui sebanyak sembilan program utama yang termuat dalam Renstra 2017-2022 sebagai pengembangan dari lima SPM dinas sosial. Selain itu, masyarakat Kabupaten Buleleng yang merasakan atas dampak upaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dipantau melalui kuadran ketiga dalam pendekatan LM. Jumlah penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 257,5% atau 3.900 KK dari target indikator RPJMD tahun 2022 yang hanya 2.750 KK.

Saran penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng perlu melakukan audiensi khusus kepada Bupati Buleleng dan Dinas Sosial Provinsi Bali dengan topik keadaan masyarakat miskin Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng perlu lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bantuan sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan segala media yang dimiliki sehingga penerima bantuan sosial merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng perlu membentuk kelas pendampingan awal terkait pelatihan dan sosialisasi kepada tim pendamping sosial sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Buleleng dan menghadapi dinamika persoalan masyarakat Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan bantuan sosial

### References

- Aalto, K., & Kallio, K. (2019). Changing institutional logics : shifting to a new service model in the Finnish public sector. *Public Money & Management*, 39(7), 486–493. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1588559>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. (2021). *Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021*. Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021. <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i4.10445>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2016). *Data BPS Luas Wilayah dan Letak Geografis Pulau Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali; Badan Pusat Statisti Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id>
- Baskoro, F., & Akbar, R. (2018). Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 52–63. <https://doi.org/10.18196/jati.010206>
- BPS Indonesia. (2020). STATISTIK Profil Kemiskinan di Orang. *Profil Kemiskinan Di*

- Indonesia Maret*, 07(56), 1–12.
- Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan). In *Mycolological Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, A. Dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inastri, M. A., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1400-1429.
- Julian, D. A. (1997). The utilization of the logic model as a system level planning and evaluation device. *Evaluation and Program Planning*, 20(3), 251–257. [https://doi.org/10.1016/S0149-7189\(97\)00002-5](https://doi.org/10.1016/S0149-7189(97)00002-5)
- Julian, D. A., Jones, A., & Deyo, D. (1995). Open systems evaluation and the logic model: Program planning and evaluation tools. In *Evaluation and Program Planning* (Vol. 18, Issue 4, pp. 333–341). [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(95\)00034-8](https://doi.org/10.1016/0149-7189(95)00034-8)
- Knowlton, L.W. & Phillips, C. . (2013). *The Logic Model Guidebook* (2nd ed.). SAGE Publication.
- Longo, P. J. (2002). The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management. *Annual Conference of the American Evaluation Association*, 740, 1–20.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS in local Government: Institutional Isomorphism as NPM goes mad? *Local Government Studies*, 37(4), 367–389. <https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702>
- Stanley, T., Jennings, N., & Mack, J. (2008). An Examination of the Content of Community Financial Reports in Queensland Local Government Authorities. *Financial Accountability and Management*, 24(4), 411–438. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00460>.
- Astanto, Tri., Saleh, Choirul., & Rozikin, Mochamad (2019). Penyusunan Informasi Kinerja dengan Pendekatan *Logic Model* dalam Perencanaan dan Penganggaran di Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 116-125. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.14>
- Wholey, J. (1979). *Evaluation: Promise and performance*. Washington D.C: The Urban Institute Press.
- Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. *The Canadian Journal of Action Research*, 14(1), 69–71. <https://doi.org/10.33524/cjar.v14i1.73>